

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA
ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN KRIMINAL**



Oleh:

NAMA : RIO S. TAMBUNAN

NIM : 2302198005

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister

Hukum

Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana

Konsentrasi Hukum Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2024



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Rio S. Tambunan

NIM : 2302198005

Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL
NEGARA ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN
KRIMINAL

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan publikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Juni 2024
Yang membuat Pernyataan,



(Rio S. Tambunan)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA ATAS
DUGAAN PELANGGARAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN
KRIMINAL**

Oleh:

Nama : Rio S. Tambunan
NIM : 2302198005
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 15 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Zulfahda Saragi, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Direktur

Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., P.A.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI AKHIR

Pada tanggal 10 Juni 2024, telah diselenggarakan sidang akhir Tugas Akhir Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rio S. Tambunan

NIM : 2302198005

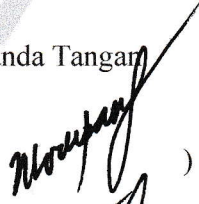
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal.

Jakarta, 10 Juni 2024

Oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum.	Ketua	()
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Penguji	()
3. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Penguji	()



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rio S. Tambunan

NIM : 2302198005

Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan bila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, makasaya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 10 Juni 2024
Yang membuat Pernyataan,



(Rio S. Tambunan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal”**

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang tiada henti-hentinya membimbing serta memberikan petunjuk, dorongan, dan semangat dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

7. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Istri Penulis Monalisa Marbun, S.H., dan Anak penulis Celine Artha Nauli Tambunan, yang selalu memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan perkuliahan Program Magister Hukum ini.
9. Orang tua penulis Lince Situmorang dan saudara-saudara penulis Eris Lasma Uli Tambunan, Dortua Rosalina Tambunan, Mariana Tambunan, Susi Trisna Tambunan, dan Hatorangan Tambunan, yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Rekan kerja penulis dari Kantor Hukum HJP & Co yang selalu memberikan bantuan, semangat dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 10 Juni 2024

Penulis

RIO S TAMBUNAN

NIM: 2302198005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI AKHIR.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian	23
D. Kerangka Teoritis Dan Konsep	26
1. Kerangka Teoritis	26
2. Kerangka Konsep	38
E. Metode Penelitian.....	41
1. Pengertian	41
2. Tipe penelitian	42
3. Spesifikasi Penelitian.....	43
4. Metode Pendekatan.....	43
5. Sumber Data	44
6. Teknik Pengumpulan Data	46
7. Metode Analisis Data.....	47
F. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II.....	51
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	51
A. Kerangka Teoritik.....	51
1. Teori Tujuan Hukum	52
2. Teori Kebijakan Kriminal.....	57
B. Kerangka Konsep	60
1. Pengertian Tindak pidana korupsi	60
2. Unsur-Unsur Tindak pidana korupsi	64
3. Subjek dalam Tindak pidana korupsi	68
4. Jenis-Jenis Tindak pidana korupsi.....	69
5. Pengaturan Tindak pidana korupsi	74

BAB III.....	77
PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI SANKSI TERHADAP TINDAKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	77
A. Pengaturan Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	77
1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	77
2. Undang Undang Administrasi Pemerintahan	81
3. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara	89
4. Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.....	92
5. Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	96
6. Kepres Tentang Badan Kepegawaian Negara	98
B. Implementasi sanksi terhadap tindakan Aparatur Sipil Negara	100
C. Bentuk dan Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak pidana korupsi	105
BAB IV	110
SINKRONISASI DAN HARMONISASI UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG MELANGGAR PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESFEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL	110
A. Tindak pidana korupsi pada Aparatur Sipil Negara	110
1. Diberhentikan dengan hormat	116
2. Diberhentikan tidak dengan hormat	117
3. Diberhentikan sementara	118
B. Kebijakan Kriminal	118
C. Kedudukan Hukum PNS Setelah Diputuskan Bersalah atau Tidak Bersalah	120
BAB V.....	123
PENUTUP.....	123
A. KESIMPULAN	123
B. SARAN	125
DAFTAR PUSTAKA	127

ABSTRACT

- A. *Student Name* : Rio S. Tambunan
 B. *Student Parent Number* : 2002190035
 C. *Title* : *Legal Protection for State Civil Servants for
 Alleged Violations of Article 2 and Article 3 of the
 Corruption Crime Law from a Criminal Policy
 Perspective*
 D. *Specificity Program* : *Crimminal Law*
 E. *Reading List* : *Books, Laws and Journals*
 F. *Keywords* : *State Civil Service, Criminal Policy*
 G. *Number of Pages* : *X + 132*
 H. *Content Summary* :

This research examines legal protection for State Civil Apparatus (ASN) who are suspected of violating Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law from a criminal policy perspective. The main objective of this research is to analyze how legal protection is applied to ASN accused of committing criminal acts of corruption and to assess the extent to which existing criminal policies are able to handle these cases effectively and fairly.

The methodology used in this research is a normative juridical approach, utilizing secondary data from literature studies, statutory regulations and related documents. The results of the analysis show that although there are provisions that provide legal protection for ASN, their implementation is still hampered by a lack of harmonization and synchronization between relevant laws.

State Civil Servants (ASN) who cause financial or economic losses to the state can be subject to sanctions in accordance with regulations, including Law Number 5 of 2014 and Law Number 30 of 2014. Sanctions do not always take the form of criminal acts of corruption, but can take the form of heavy administrative sanctions. It is important to assess the intentions and impacts of ASN actions so that not all mistakes are criminalized.

This research recommends revisions and improvements to related laws and regulations as well as increased coordination between law enforcement agencies to ensure effective legal protection for ASN. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of better legal policies to protect the rights of ASN and support efforts to eradicate criminal acts of corruption effectively and fairly.

- I. *Supervisor* : 1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
 2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Jakarta, 14th, May, 2024


 (Rio S Tambunan)

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Rio S. Tambunan
B. Nomor Induk Mahasiswa : 2002190035
C. Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
E. Daftar Bacaan : Buku, Undang-Undang dan Jurnal
F. Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Kebijakan Kriminal
G. Jumlah Halaman : X+ 132
H. Ringsakan Isi :

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif kebijakan kriminal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diterapkan kepada ASN yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi serta menilai sejauh mana kebijakan kriminal yang ada mampu menangani kasus-kasus tersebut secara efektif dan adil.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi ASN, penerapannya masih terhambat oleh kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang relevan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebabkan kerugian keuangan atau ekonomi negara dapat dikenai sanksi sesuai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sanksi tidak selalu berupa tindak pidana korupsi, tetapi bisa berupa sanksi administratif berat. Pentingnya penilaian niat dan dampak dari tindakan ASN agar tidak semua kesalahan dikriminalisasi.

Penelitian ini merekomendasikan revisi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait serta peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi ASN. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak ASN serta mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan adil.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Jakarta, 14 Mei 2024

(Rio S. Tambunan)